

---

## Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilih Pemula di Kabupaten Blitar

Abdul Hakam Sholahuddin<sup>1</sup>, Sulisty Anjarwati<sup>2</sup>, Sifa Amalia<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Ilmu Hukum, Universitas Islam Balitar, Jl. Majapahit No.2- 4, Kota Blitar, Jawa Timur 66137

<sup>2</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Balitar, Jl. Majapahit No.2- 4, Kota Blitar, Jawa Timur 66137

**Correspondence:** hakamdabdul@gmail.com

Received: 29 07 22 - Revised: 04 08 22 - Accepted: 23 08 22 - Published: 09 09 22

**Abstrak.** Pemilih pemula diasumsikan memiliki perilaku politik yang khas. Pemilih pemula menjadi incaran partai politik karena setidaknya memiliki dua arti penting, yakni menjadi ajang pemungutan suara dalam pemilu dan segmen ini menjadi penentu apakah rapat umum parpol memiliki arti penting untuk dipublikasikan atau tidak. mempengaruhi calon pemilih lainnya. Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan partisipasi politik pada pemilih pemula di Kabupaten Blitar. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini tersusun dari beberapa tahapan yang sudah di susun secara sistematis. Hasil dari kegiatan pengabdian ini yaitu kegiatan berjalan lancer, dimana peserta merasa terdorong untuk lebih aktif di kegiatan pemilu kedepannya.

**Kata kunci:** *partisipasi, politik, pemilih pemula, kabupaten blitar.*

---

**Citation Format:** Sholahuddin, A. H., Anjarwati, S., & Amalia, S. (2022). Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilih Pemula di Kabupaten Blitar. *Prosiding Seminar Nasional Abdimas Ma Chung (SENAM)*, 2022, 169—175.

---

---

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebagai wujud demokrasi pancasila. Pemilu dan pemilu merupakan simbol dan tolok ukur demokrasi (Sutrisno, 2017). Dengan terselenggaranya pemilu atau pemilu merupakan sistem demokrasi yang menjamin kebebasan warga negara untuk diwujudkan melalui pemberian hak pilih atau partisipasi untuk memilih sebagai bentuk partisipasi masyarakat secara luas. Dalam demokrasi Pancasila, pemilu atau pemilu merupakan sarana untuk menegakkan kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, pemilu bertujuan untuk menjamin transisi pemerintahan yang aman dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan untuk memenuhi hak asasi manusia sebagai warga negara. Dalam melaksanakan kedaulatan rakyat, pemilu merupakan kesempatan bagi masyarakat atau warga negara untuk menggunakan haknya untuk memilih wakil-wakil yang akan menjalankan kedaulatannya dan juga membuka peluang bagi masyarakat sebagai anggota legislatif, presiden atau kepala daerah yang dipercaya oleh pemilihnya (Rahmanto, 2018).

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan salah satu indikator terselenggaranya kekuasaan negara tertinggi yang sah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang diwujudkan dengan keterlibatannya dalam pesta demokrasi (Pemilu) (Triono, 2017). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami serta terlibat dalam kegiatan kenegaraan. Di sisi lain, rendahnya tingkat partisipasi politik secara umum menunjukkan bahwa masyarakat kurang memiliki apresiasi atau minat terhadap isu atau kegiatan negara. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat tercermin dari sikap golongan kulit putih (golput) dalam pemilu (Promise, 2014). Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum juga sangat penting untuk diperhatikan, karena rendah atau tingginya partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting dari proses demokratisasi dan perwujudan kedaulatan rakyat.

Pemilih pemula diasumsikan memiliki perilaku politik yang khas (Sangkoyo, Lopian & Gosal, 2019). Pemilih pemula menjadi incaran parpol karena setidaknya memiliki dua arti penting, yaitu arena pemungutan suara dalam pemilu dan segmen inilah yang menentukan apakah rapat umum parpol memiliki arti penting untuk dipublikasikan dan mempengaruhi calon pemilih lainnya (Sutrisno, 2018).

Pemilih pemula sering digambarkan dengan perilaku sebagai berikut: 1) Pemilih yang masih labil; 2) Pemilih yang memiliki pengetahuan politik yang baik relatif rendah; 3) Pemilih yang cenderung didominasi oleh peer-groups; 4) Pemilih yang melakukan pilihan karena popularitas partai politik atau calon yang diajukan oleh partai politik; dan 5) Pemilih yang datang ke TPS hanya untuk mendaftar atau mengakhiri haknya (Bakti, 2019).

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai upaya sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka memahami dan benar-benar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal (Rahman, 2018). Keberhasilan pendidikan politik ditentukan oleh cara pandang yang jelas melalui dua dimensi, berupa gambaran yang jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan dan situasi aktual masyarakat itu sendiri yang dapat dibandingkan secara langsung dengan tuntutan sistem politik ideal (Lestari, 2018).

## **MASALAH**

Data empiris menunjukkan kecenderungan partisipasi masyarakat dalam pemilu masih rendah. Hal ini terlihat dari jumlah partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Blitar pada pelaksanaan Pilpres 2014 sekitar 11%. Sedangkan jumlah partisipasi pemilih pemula pada Pilpres 2019, yakni sekitar 8,6%. Terlihat juga jumlah partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2020 sekitar 7%. Dari data di atas terlihat bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih pemula memiliki banyak alasan. Dalam kaitan ini, masalah prioritas yang dihadapi mitra adalah rendahnya partisipasi pemilih muda di Kabupaten Blitar. Sehingga diperlukan suatu program untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda di Kabupaten Blitar sebagai bentuk negara demokrasi.

## **METODE PELAKSANAAN**

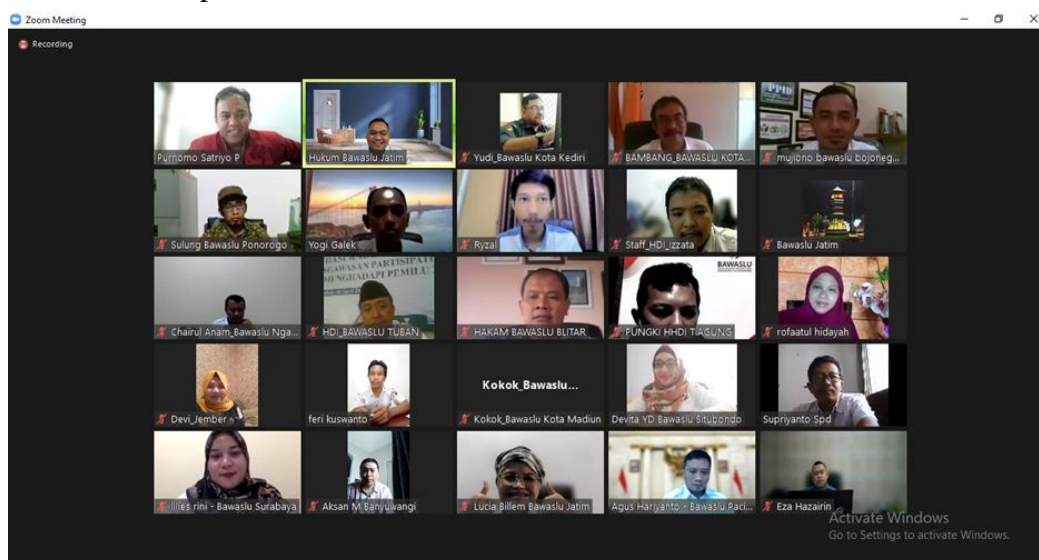
Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Blitar secara online melalui zoom. Peserta kegiatan pengabdian ini merupakan siswa/siswi di Kabupaten Blitar yang berjumlah 50 peserta. Metode pengembangan dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan berbagai rangkaian tahapan yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Pembuatan materi
2. Pembuatan konsep sosialisasi
3. Pelaksanaan sosialisasi secara online

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi politik adalah proses pendidikan politik kepada generasi baru yang bertujuan agar mereka dapat menjalankan peran politik yang mapan di masa depan. Selain itu, sosialisasi politik adalah penanaman perilaku dan pembelajaran politik kepada warga negara melalui beberapa prosedur sosialisasi politik, sehingga akan terbentuk perilaku yang kompeten dalam kehidupan politik baik melalui jenjang sekolah resmi atau lembaga pendidikan di luar pemerintahan maupun melalui komunikasi dan pembelajaran dalam keluarga, hidup atau pergaulan. Dalam kegiatan PKM ini, tim pengabdian melakukan kegiatan sosialisasi politik secara online melalui kegiatan webinar di aplikasi Zoom.

Tim PKM dalam melakukan webinar sosialisasi politik menggunakan strategi yang bertujuan untuk mengetahui cara mereka dalam mengajak peserta utamanya pemilih pemula agar bisa melakukan pencoblosan. Materi berguna untuk memberi edukasi dan pengetahuan terkait pemilu.



**Gambar 1.** Foto Kegiatan Webinar Peningkatan Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini diawali dengan diadakannya tanya jawab mengenai pemahaman peserta terkait pentingnya partisipasi dalam mengikuti kegiatan pemilu. Berdasarkan jawaban dari peserta, banyak peserta yang masih kurang mengetahui tentang pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pencoblosan/pemilihan umum. Mereka kebanyakan asal memilih dan tak jarang yang mengalami golput. Oleh karena itu tim PKM berusaha untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya satu suara yang diberikan oleh masyarakat.

Usai sesi tanya jawab, pemaparan dilanjutkan oleh Bapak Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H tentang Pengertian Pemilih Pemula. Pemilih pemula yang terdiri dari pelajar,

mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun merupakan segmen yang memang unik, kerap menghadirkan kejutan dan tentunya menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, karena perilaku pemilih pemula sangat antusias, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tidak terlalu tercemar oleh pragmatisme. Pemilih pemula di bidang politik merupakan kelompok pertama yang menggunakan hak pilihnya. Aspirasi politik pemilih baru selalu dinamis dan berubah sesuai dengan keadaan dan faktor yang mempengaruhinya. Namun, kehadiran pemilih baru di setiap pemilihan umum merupakan pertanda pasti untuk mengamankan posisi strategis yang dicita-citakan oleh setiap calon yang mencalonkan diri.

Bentuk baru partisipasi pemilih dalam pemilihan umum adalah kampanye, suatu tindakan untuk mempengaruhi dan memperoleh simpati serta memenangkan suara sebanyak-banyaknya untuk memilih dan memenangkan calon tertentu. Kampanye adalah bagian penting dari sebuah kampanye. Sebagian besar pemilih pemula sudah mengetahui tujuan dari kampanye itu sendiri. Ini tentang memberikan informasi pemungutan suara dan menjelaskan visi dan misi kami sehingga kami dapat beresonansi dengan pemilih.

Kandidat membangun simpati untuk upaya kampanye dalam berbagai cara. Misalnya, menggunakan bintang hiburan, baik penyanyi atau selebritas, dalam kampanye publik, memberikan layanan sosial, atau membantu membangun tempat ibadah untuk menarik perhatian publik. Perhatian pemilih. Terutama pemilih pemula memilih.

Anggapan pemilih baru bahwa berkampanye merupakan kegiatan yang menyita waktu dan mengganggu membuat para pemilih baru ini enggan untuk ikut serta dalam kampanye. Ada juga pemilih baru yang yakin tidak akan berkampanye karena tidak suka dibanjiri suasana kampanye terbuka. Beberapa pandangan pemilih baru menunjukkan kurangnya minat kampanye pemilih baru, kecuali mereka yang tidak terbiasa berkampanye karena berbenturan dengan kegiatan sekolah.

Faktor penghambat partisipasi pemilih dalam politik adalah aktivitas keseharian pemilih pada umumnya, mahasiswa, dan pekerja. Ini sangat masuk akal untuk pemula dengan usia rata-rata 17-21. Untuk itu, pemilih pemula enggan mengikuti kegiatan politik yang biasanya memakan waktu lama. Tuntutan untuk belajar dan bekerja menjadi alasan utama pemilih enggan bekerja di dunia politik. Peran pemilih baru yang sangat kompleks dalam aktivitas sehari-hari dalam menjalankan tanggung jawab pribadi menjadi faktor utama yang menghambat mereka untuk berpartisipasi dalam kampanye pemilihan umum.

Usai menyampaikan materi terkait peran pemilih pemula, banyak peserta yang menjawab bahwa memang peserta yang masih tergabung dalam kelompok pemilih menganggap kegiatan kampanye atau kegiatan yang berkaitan dengan pemilu merupakan kegiatan yang merepotkan, namun setelah pemaparan materi terkait pentingnya Dari peran pemilih pemula dalam kegiatan pemilu, peserta merasa terdorong untuk lebih aktif dalam kegiatan pemilu mendatang.

## **KESIMPULAN**

Setelah dilakukannya rangkaian kegiatan webinar dengan judul peningkatan partisipasi politik pada pemilih pemula di Kabupaten Blitar dapat disimpulkan bahwa kegiatan berjalan lancar, dimana peserta merasa terdorong untuk lebih aktif di kegiatan pemilu kedepannya. Rendahnya pendidikan politik membuat pemilih pemula rentan menjadi sasaran mobilisasi oleh kepentingan tertentu. Bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu adalah memilih, berkampanye, dan membicarakan isu-isu politik. Pemilih pemula memiliki karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai perbedaan tersebut, pemilih pemula cukup banyak orang yang peduli dan sadar akan hak politiknya sebagai masyarakat. Pemilih pemula memiliki karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai perbedaan tersebut, para pemilih pemula cukup banyak peduli dan sadar akan hak politiknya, perannya sebagai masyarakat. Keempat, berupa perbedaan wilayah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bakti, I. S., & Amin, K. (2019). Konstruksi kekuasaan politik melalui program charity show media televisi. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(1), 63-72.
- Janji, L. (2014). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (Studi pada Pelajar di Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Makassar)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang. *Integralistik*, 29(1), 10.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 44-51.
- Rahmanto, T. Y. (2018). Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten. *Jurnal HAM*, 9(2), 103-119.

- Sangkoy, R., Lopian, M., & Gosal, R. (2019). Perilaku politik pemilih pemula pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten Minahasa Selatan tahun 2016 (Studi Di Desa Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 36-48.
- Sutrisno, S., Yuningsih, N. Y., & Agustino, L. (2018). Komparasi Teori Marketing Politik 4p Menurut Niffenegger dan 3p Menurut Adman Nursal. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(2), 106-111
- Triono, T. (2017). Pemilu Dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2).



© 2022 by authors. Content on this article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).